

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BONDOWOSO

Silviana Syavitri

13040254095 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) silvianasyavitri@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmokoadi@unesa.ac.id

Abstrak

Di Bondowoso angka buta aksara dinilai cukup tinggi. Data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso penyandang buta aksara berkisar di angka 70 juta jiwa pada tahun 2011, hingga pada akhir tahun 2016 hanya tersisa 2000 jiwa. Penelitian ini ingin mengungkapkan tentang implementasi program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang diantaranya adalah kepada bidang pendidikan nonformal dan PAUD, kepala sesi bidang nonformal, tutor dan penyandang buta aksara. Program yang digunakan berupa keaksaraan fungsional dengan dua kegiatan yakni keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan atau usaha mandiri. Pelaksananya dilaksanakan secara bergantian antara keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Pada keaksaraan fungsional dasar dilaksanakan selama 6 bulan dengan kegiatan pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan, pada keaksaraan fungsional usaha mandiri dilaksanakan kurang lebih 3-5 bulan. Ketika warga belajar sudah dinyatakan lulus maka warga belajar akan mendapatkan ijazah berupa SUKMA. Evaluasi program keaksaraan fungsional dilakukan dengan pemberian soal-soal dan ulangan pada kegiatan keaksaraan fungsional dasar. Pada keaksaraan fungsional lanjutan dengan pendampingan saat diberikannya keterampilan sehingga selain evaluasi juga terjadi proses *monitoring* oleh penyelenggara kegiatan dan tutor. Dengan diberlakukannya program keaksaraan fungsional membuat angka buta aksara di Bondowoso menurun dan menghasilkan warga belajar yang melek aksara.

Kata Kunci: Implementasi, Buta Aksara, dan Kabupaten Bondowoso

Abstract

In Bondowoso the illiteracy rate is high. Provided by the education offices of illiterate bureaucratic districts ranged from 70 millions in 2011, to the end of 2016 only 2000 people. The research would like to reveal about the implementation of illiteracy eradication program in Bondowoso. the method used is qualitative descriptive. The technique of collecting data through not structured interviews, observation, and documentation. Informants in the research ink as many as six people, including the head of non formal education and early childhood, head of non formal education sessions, tutors, and people with illiteracy. The program was used in the form of functional literacy with two activities namely functional literacy primary and functional literacy advanced or an independent effort. The implementations of the program will be held on by turns a scale between basic literacy and functional literacy. On basic of the functional literacy was conducted over 6 months with learn reading activities, writing and counting. But On independent effort functional literacy was carried out more or less 3-5 months. When citizens learn passed they were learn will get certified of SUKMA. The Evaluation of functional literacy program done by the provision of questions and remedial of work on the functional literacy base. In functional literacy advanced with associating when gave skills which besides evaluation are also happened the process of monitoring by the activities and a tutor. With the enactment of fuctional literacy programs make illiteracy in Bondowoso decreased and resulted in literate learners.

Key Words : Implementation, Illiterate, and Bondowoso regency

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional suatu negara. Ini dapat diukur dari tingkat kecerdasan serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mencetak sumber daya manusia yang

berkualitas dari segi spiritual, intelegensi dan *skill*. Oleh karena itu, pendidikan pada era saat ini dituntut untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan perilaku yang baik, jujur, amanah, bertanggung jawab dan dapat membaca peluang. Kualitas manusia sebagai pelaku dari

pembangunan nasional itu sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan nasional dari suatu Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, pasal 1 berbunyi : “Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan minat belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik se 671 aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Pembangunan nasional yang dimaksud disini adalah pembangunan kearah terciptanya tujuan nasional dari suatu bangsa. Indonesia sendiri memiliki tujuan nasional seperti yang tertuang pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alenia ke 4. Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah poin yang sangat penting. Di mana ini bisa tercapai apabila pendidikan di Indonesia sudah membaik.

Pendidikan di Indonesia jika kita lihat pada zaman sekarang ini, masih banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini diakibatkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya adalah mahalnya biaya sekolah, kurangnya minat yang dimiliki oleh generasi muda, dan ketidakmampuan mereka dalam belajar. Padahal pendidikan itu adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan, pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengarahkan potensi anak ke arah yang lebih baik, hingga nantinya dengan potensi itu diharapkan ia mampu menjadi seorang individu yang berguna bagi masyarakat maupun negara (Suryosubroto, 2010).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk mempunyai kecerdasan, kepribadian dan akhlak yang mulia. Tujuan dari Pasal 1 tersebut yakni agar generasi muda memiliki kecerdasan yang mampu mewujudkan cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecerdasan ini tentunya timbul karena adanya beberapa faktor, yaitu keturunan, gizi dan lingkungan. (sindikker.dikti.go.id. Diakses tanggal 12 Desember 2016)

Pendidikan nasional akan tercapai ketika ketiga faktor pendorong kecerdasan sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tetapi ketika ketiga faktor pendorong kecerdasan tidak dapat terpenuhi maka akan timbul kendala-kendala dalam bidang pendidikan yang berimbas pada pembangunan nasional dan terhambatnya pencapaian untuk mewujudkan cita-cita dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kendala yang timbul bisa dari faktor pemerintahan dan juga bisa dari sumber daya manusianya. Faktor yang disebabkan oleh pemerintahan dapat berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan. Contohnya : sekolah, apabila kita lihat sekolah-sekolah di daerah pedalaman belum sepenuhnya tersentuh oleh pemerintah. Di daerah Bondowoso misalnya pada salah satu desa yaitu desa Sempol, disana terdapat sekolah SD yang bisa dikatakan tidak layak untuk disebut sekolah. Mengapa demikian? Karena di sekolah tersebut hanya terdapat empat gedung yang digunakan secara bergantian untuk anak kelas 1 sampai 6. Ini sungguh sangat memprihatinkan apabila kita bandingkan dengan sekolah - sekolah yang ada di kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya.

Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah untuk menumbuhkan kecerdasan pada generasi muda terlihat kurang merata. Otonomi daerah yang ada pada setiap daerah belum bisa dijalankan dengan baik. Ini harus segera kita benahi agar pendidikan di Indonesia bisa semakin merata dan semakin membaik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat.

Selanjutnya adalah faktor yang disebabkan oleh sumber daya manusia. Faktor ini dapat berupa ketidakmampuan manusia dalam membaca, mengenal huruf dan menulis. Ketidakmampuan ini sering disebut dengan istilah “Buta Huruf atau Buta Aksara”. Padahal untuk bisa bersekolah pada jenjang SD, anak – anak harus memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti tingkat SMP, SMA sampai pada bangku kuliah. Menurut data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah buta aksara di Indonesia hingga akhir 2014 mencapai 5,97% juta jiwa. Sedangkan jumlah ini merupakan 3.7 % dari total penduduk yang ada di Indonesia.

Buta aksara juga dikenal dengan nama buta huruf. Masalah buta aksara sudah menjadi masalah dunia, bahkan UNESCO sudah mendeklarasikan melalui Deklarasi Dakkar 2013 mengenai masalah buta aksara. Buta aksara termasuk dalam ranah pendidikan non formal, di mana dalam proses pemberdayaannya buta aksara ditangani dengan menggunakan program keakarsaan fungsional.

Buta aksara adalah seseorang yang tidak dapat membaca, menulis, dalam huruf latin dan berhitung dengan angka Arab, sedangkan buta aksara fungsional

adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan kemampuan baca, tulis, dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Buta aksara dibagi menjadi 3 definisi yaitu : (1) Buta aksara murni adalah penduduk yang sama sekali tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan sistem aksara apapun juga. (2) Buta aksara untuk konteks Indonesia didefinisikan sebagai buta aksara latin dan angka arab, buta Bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. Atau dengan kata lain, buta aksara adalah penduduk yang belum memiliki kemampuan tersebut dan belum memfungsikannya dalam kehidupan sehari-hari. (3) Melek aksara ditafsirkan sebagai melek aksara latin Bahasa arab, melek Bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar. Dengan demikian melek aksara adalah penduduk yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang dalam membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan simbol atau jenis tulisan apapun.

Buta aksara merupakan kendala yang sangat berpengaruh pada tumbuhnya kecerdasan seorang anak. Menurut Kabid Pendidikan Non formal ibu Murni mengatakan bahwa, ketika anak tidak bisa untuk membaca dan menulis maka anak tersebut akan kehilangan semangat untuk belajar, dan itu menyebabkan anak tidak mampu menerima materi dengan cepat seperti teman-temannya. Ketika hal yang demikian terjadi anak akan memilih untuk berhenti sekolah daripada melanjutkan sekolah. Hal ini banyak terjadi di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah. Contohnya saja di Bondowoso, angka buta aksara di Bondowoso terbilang cukup tinggi. Tingginya angka buta aksara ini menjadi masalah utama yang harus segera ditangani oleh pemerintah terutama oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Pengentasan angka buta aksara harus diawali dari sosialisasi untuk menghilangkan pemikiran orang tua yang kolot tentang pentingnya pengetahuan. Ketika para orang tua sudah mengerti tentang pentingnya pengetahuan maka para orang tua akan menyuruh anaknya untuk bersekolah dan mencari ilmu untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk menempuh pendidikan, setiap anak harus dibekali dengan kemampuan membaca dan menulis sebagai pelajaran awal pada pendidikan tingkat dasar.

Pengentasan angka buta aksara mulai dilakukan oleh pemerintah daerah Bondowoso, dengan dikeluarkannya beberapa peraturan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014. Kedua peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut, menjelaskan tentang pengoptimalan sistem pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal, serta kebudayaan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memiliki visi yaitu Terwujudnya Insan Cerdas, Religius dan Kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kebijakan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan visi itu, maka dibentuklah 6 tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yaitu 1. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa, 2. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan, 3. Terjaminnya kepastian memperoleh pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan, 4. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan, 5. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu, relevan, dengan kebutuhan masyarakat, dan 6. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan yang bermutu dan relevan. Dan untuk menangani masalah buta aksara masuk dalam tujuan kelima yaitu tersedianya dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu, relevan, dengan kebutuhan masyarakat, tujuan ini memuat beberapa strategi pencapaian tujuan diantaranya adalah penyediaan dan peningkatan kualitas (kualifikasi dan kompetensi tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup yang memadai dimana dalam kegiatan ini adalah kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan beberapa ormas seperti PKK, NU, Muhammadiyah, karang taruna, persit, bhayangkari dan gabungan organisasi wanita. Ormas ini ikut dalam membantu, mengajar dan mengawasi pelaksanaan kegiatan buta aksara di daerah Bondowoso

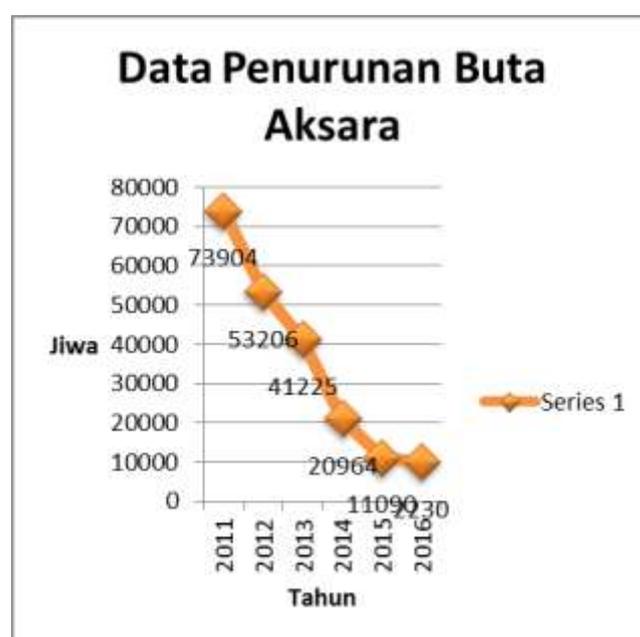
Salah satu program yang dikembangkan PKBM adalah program keaksaraan fungsional, program ini bertujuan membelajarkan masyarakat (warga belajar) agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, hitung dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Program keaksaraan diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan

pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pembebasan buta aksara. Kesadaran ini didasarkan atas pandangan bahwa terdapat hubungan antara keniraksaraan dengan kemiskinan. Keniraksaraan disebabkan oleh kurang memiliki kemampuan keaksaraan. Hal ini berakibat pada kurang mampu mengenal pemerintah atau petunjuk untuk melahirkan tingkah laku dalam menjawab tuntutan lingkungannya, sehingga menjadi terasing dari dunia dan sekitarnya.

Program keaksaraan fungsional merupakan wahana pembelajaran untuk kelompok sasaran buta aksara, baik karena tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah maupun yang putus pendidikan dasar sebelum waktunya, khususnya pada kelas-kelas awal (1,2 dan 3). Beberapa karakteristik warga belajar keaksaraan fungsional yang teridentifikasi diantaranya adalah (a) kemampuan nalar rendah, (b) minat terhadap pembelajaran sangat rendah, (c) pengalaman dan kebiasaan yang sudah melekat dengan cara-cara lama, (d) mengikuti pembelajaran dengan suka rela tidak dengan dipaksa, dan (e) tidak memungkinkan mengikuti pendidikan yang teratur dengan jadwal yang ketat (Kamil Mustofa, 2009:94).

Untuk memahami konsep keaksaraan fungsional, kita perlu kembali melihat ketika ia dilahirkan, yaitu pada tanggal 8-18 September 1965 dalam suatu konferensi menteri pendidikan sedunia tentang pemberantasan buta aksara (*eradication of illiteracy*) di Teheran, Iran (Marzuki, Saleh. 2012:120). Selanjutnya, UNESCO (1966) meringkas dan memperjelas konsep tersebut dengan elemen-elemen sebagai berikut : (1) Program keaksaraan hendaknya tergabung ke dalam dan terhubung dengan perencanaan ekonomi dan sosial, (2) Pemberantasan buta aksara hendaknya dimulai dari penduduk yang memiliki motivasi tinggi dan yang bermanfaat bagi pengembangan daerahnya, (3) Program keaksaraan hendaknya dikaitkan dengan prioritas ekonomi, dan dilaksanakan di daerah yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi, (4) Program keaksaraan seharusnya tidak hanya mengajar membaca dan menulis, tetapi juga pengetahuan profesional dan teknis sehingga menimbulkan partisipasi pembelajaran orang dewasa secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan civic atau kewarganegaraan, (5) Program keaksaraan harus merupakan bagian dari perencanaan pendidikan menyeluruh dan system pendidikan yang berlaku, (6) Kebutuhan pendanaan keaksaraan fungsional hendaknya berasal dari berbagai sumber pemerintah dan swasta maupun berasal dari investasi ekonomi, (7) Program keaksaraan hendaknya membantu mencapai tujuan ekonomi, seperti : meningkatkan produktivitas tenaga kerja, produksi bahan makanan, industrialisasi, mobilitas sosial dan professional, kriteria tenaga kerja baru dan beragamnya aktivitas ekonomi.

Program yang digunakan oleh Dinas pendidikan kabupaten Bondowoso dikenal dengan istilah keaksaraan fungsional. Dalam program ini terdapat kegiatan-kegiatan yang digunakan dalam pengentasan buta aksara. Diantaranya adalah keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan. Program keaksaraan fungsional berjalan dalam rentang waktu 6 bulan sedangkan pada program keaksaraan lanjutan berjalan dalam rentang waktu kurang lebih 3-5 bulan. Dari program ini terlihat bahwa terjadi penurunan penyandang buta aksara yang ada di Bondowoso. Dari penurunan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai bentuk program dalam pengentasan buta aksara, agar nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi dinas pendidikan lainnya dalam pengentasan buta aksara. Berikut adalah bagan mengenai penurunan penyandang buta aksara yang ada di Bondowoso :



Bagan 1

Angka buta aksara di Kabupaten Bondowoso

Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso tahun 2016

Data di atas menunjukkan bahwa angka buta aksara di Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya sudah mulai menurun. Menurut penjelasan dari Kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dispendik Dra. Murni, M.Si bahwa meskipun angka buta aksara menurun bukan berarti berhasil dituntaskan 100%, ini terjadi karena ada beberapa kendala di antaranya adalah pindah keluar kota dan sibuk bekerja. Selain itu penyandang buta aksara juga terdiri dari warga yang idiot dan bisu, ini memerlukan penanganan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan yang lain, dan dalam kasus ini Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso belum menemukan jalan keluar

karena masih terbatasnya tenaga pendidikan non formal yang ahli dalam pendidikan luar biasa.

Tabel 1 Data Rencana Penuntasan Buta Aksara Di Kabupaten Bondowoso Usia 15 – 59 Tahun.

No	Kecamatan	Tahun 2010 usia 15 – 59 tahun	Garapan tahun 2011 s.d 2015	Sisa garapan 2016
1	Cermee	5.796	5.640	156
2	Tlogosari	5.473	5.460	13
3	Botolinggo	4.992	4.990	2
4	Maesan	4.864	4.860	4
5	Pakem	4.453	4.360	93
6	Wonosari	3.596	3.550	46
7	Wringin	4.764	4.130	634
8	Jambesari darus sholah	4.520	4.510	10
9	Pujer	4.370	4.140	230
10	Curahdami	3.336	3.080	256
11	Tegalampel	3.000	2.980	20
12	Sumber wringin	3.237	3.230	7
13	Taman krocok	2.978	2.920	58
14	Tapen	2.798	2.670	128
15	Tamanan	2.568	2.420	148
16	Grujugan	2.333	2.140	193
17	Tenggaran g	2.158	2.030	128
18	Prajejan	1.795	1.770	25
19	Bondowoso	1.367	1.320	47
20	Sukosari	1.682	1.650	32
21	Binakal	1.299	1.300	
22	Klabang	1.645	1.660	
23	Sempol	880	970	
Jumlah		73.904	71.780	2.230

Tabel di atas menunjukkan penyandang buta aksara yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Hampir setiap daerah memiliki angka buta lebih dari 1.000 jiwa. Penyandang buta aksara tertinggi berada di Kecamatan Cermee. Ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak untuk segera menangani

masalah buta aksara yang ada di Bondowoso. Pengentasan buta aksara dilaksanakan agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik. Kebijakan publik oleh Dye (dalam Widodo, 2007:12) diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pada dasarnya kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Implementasi kebijakan publik menurut Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (dalam Widodo, 2007:96). Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureauratic structure*. (1) Faktor komunikasi (*communication*). Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran. Hal ini diharapkan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. (2) Sumber daya (*Resources*). Edward III (Widodo, 2007:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan itu tidak akan efektif. (3) Disposisi (*Disposition*). Edward III (Widodo, 2007:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. (4) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Menurut Edward III (Widodo, 2007:106), implementasi kebijakan bisa masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Stuktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Adanya program keaksaraan fungsional untuk mengentaskan buta aksara ini diharapkan agar para warga dari umur 15 sampai 59 tahun dapat memiliki kemampuan *melek* aksara. Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017, menurut kabid Pendidikan Non Formal (PNF) Dispendik Dra. Murni, M.Si menjelaskan bahwa penanganan buta aksara di Bondowoso ini berjalan dengan baik setiap tahunnya karena Diknas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendapatkan bantuan dana dari Pemprov Jawa Timur untuk pengentasan buta aksara (buta huruf). Selain itu pengentasan buta aksara menjadi lebih efektif karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dibantu oleh beberapa organisasi. Ibu Murni juga menjelaskan bahwa organisasi memiliki peranan penting, mereka aktif terjun langsung ke masyarakat untuk ikut mengajar membaca dan menulis.

Ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dinilai efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian program pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bondowoso di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui : Bentuk program yang digunakan dalam pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso dan bagaimana program, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian terurai

petunjuk secara sistematis, terencana sehingga dapat diperoleh hasil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan secara luas dan mendalam berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan, menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan untuk diolah sesuai dengan sudut pandang peneliti dan sudut pandang informan.

Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang pendidikan PAUD dan Nonformal, kepala sesi bidang pendidikan Nonformal, tutor keaksaraan fungsional dan warga penyandang buta aksara. Waktu penelitian dilakukan dari awal (pengajuan judul) sampai akhir (hasil penelitian) sekitar 7 bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan April 2017. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar dari penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang dijadikan sasaran oleh peneliti untuk dimintai informasi terkait dengan rumusan masalah.

Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dimana subyek penelitian dipilih enam informan berdasarkan tujuan penelitian dengan beberapa pertimbangan kriteria informan sebagai berikut: 1) mereka yang tergolong masih sedang aktif (dalam kurun waktu 1 tahun) atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti yaitu kegiatan-kegiatan belajar mengajar dalam program keaksaraan fungsional, 2) mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

Table 2 : Data informan

N o	Nama	Alamat	Tempat tanggal lahir	Pekerjaan
1	Dra.Murni M.Si	Kembang Rt.26 / Rw.09 kab Bondowoso	Jember, 11 Juni 1964	Kepala bidang pendidikan non formal dan pendidikan Paud
2	H. farid, S.H,	Ds Gunungsar	Bondowoso, 17 Mei	Kepala sesi

	M.Pd	i Rt.11 / Rw.04 Kec Maesan Kab Bondowoso	1964	pendidikan non formal
3	Nurfaizeh, S.Pd	Ds Jambesari Darus Soleh	Bondowoso, 17 April 1980	Guru
4	Zumariyah	Ds Lombok Kulon Rt.02 / Rw.08 Kec Wonosari Kab Bondowoso	Bondowoso, 17 Maret 1977	Penguru organisasi persit
5	Suhaeni	Ds Bercak Rt.05 / Rw.02 Kec cermee	Bondowoso, 2 Juni 1979	Tani
6	Haifa	Jambesari Rt.01 / Rw.06	Bondowoso, 4 Januari 1992	Ibu rumah tangga

Teknik pengumpulan data adalah cara dalam penelitian untuk mendapatkan data yang dapat menjawab permasalahan dan mendukung penelitiannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui dan/atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan. Wawancara mendalam adalah salah satu cara untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap dan mendalam dengan cara langsung bertatap muka (*face to face*). Metode wawancara mendalam ini dipilih dengan maksud pewawancara tidak perlu membuat pedoman wawancara secara detail, karena yang diperlukan hanya inti-inti dari pertanyaan yang akan ditanyakan. Proses wawancara akan mengalir secara natural dan terfokus pada inti permasalahan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan pengimplementasian program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso. Data yang ingin digali dalam wawancara ini adalah informasi dari kepala bidang,

kepala sesi, tutor dan warga belajar terkait dengan pengimplementasian program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso yang meliputi bentuk program yang digunakan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan keaksaraan fungsional yang dilakukan.

Data yang ingin digali dalam observasi ini adalah kesesuaian data yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pengimplementasian program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso yang meliputi bentuk program keaksaraan fungsional yang dilaksanakan, pelaksanaan evaluasi hasil dari pengimplementasian program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso.

Hasil penelitian dari wawancara tidak terstruktur dan observasi, akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi. Data dari dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari arsip foto kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal. Manfaat dari penggunaan bukti dokumen ini adalah untuk memberikan bukti nyata mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama program keaksaraan fungsional dalam pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Secara umum, peneliti melakukan empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Data yang diperoleh dari teknik wawancara dapat dicek dengan teknik observasi maupun dokumentasi agar penelitian dapat diakui kebenarannya. Kemudian bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain sehingga akan dihasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bidang Pendidikan Paud dan Pendidikan Nonformal menurut Ibu Murni selaku Kepala Bidang Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut :

“... Untuk implementasi program pengentasan buta aksara sudah kita mulai sejak tahun 2010. Programnya itu ada program keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan. Sisa garapan ditahun 2017 ini mbk, yang menempuh keaksaraan fungsional dasar ada sekitar 470 jiwa sedangkan yang keaksaraan lanjutan ini ada sekitar 1140 jiwa. Dari total penyandang buta aksara pada tahun 2010 sebanyak 73904 jiwa.....”
“(Wawancara : 3 Maret 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengentasan buta aksara di Kabup Bondowoso bisa dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat menurunnya penyandang buta aksara, dari angka 73904 jiwa ditahun 2010 menjadi 1610 jiwa di tahun 2016. Program yang dijalankan oleh Bidang Pendidikan Nonformal ada dua kegiatan yakni program keaksaraan fungsional dasar dan program keaksaraan fungsional lanjutan. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Farid selaku Kepala Sesi Bidang Pendidikan Nonformal, sebagai berikut :

“... Kegiatan kegiatan dalam program pengentasan buta aksara disini ada dua mbk. program pertama adalah keaksaraan fungsional dasar dan yang kedua adalah keaksaraan fungsional lanjutan. Kedua kegiatan ini kita laksanakan secara berurutan setiap tahunnya sampai tahun terakhir ini, pada tahun 2016 hanya menyisakan 1610 garapan untuk penyandang buta aksara.”
(Wawancara : 7 Maret 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh tutor keaksaraan fungsional dari persit yakni ibu Zumariyah yang turun langsung mengajar para penyandang buta aksara di kabupaten Bondowoso.

“... Untuk pengentasan buta aksara di Bondowoso ini, saya mengikuti pengarahannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso khususnya Bidang Pendidikan Nonformal mbk. Dari situ diberitahukan pemberantasan buta aksara menggunakan dua program kegiatan yakni keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan. Disini kita kan hanya bagian mengajar saja jadi ikut saja apa kata disana. Sesekali kalo ada masukan atau ide dalam pembaharuan sistem mengajar ya kita sampaikan di rapat evaluasi. Nanti kalo teman-teman pengajar lain setuju itu bisa kita terapkan di proses belajar mengajarnya itu tadi mbk. ...”
(Wawancara : 10 Maret 2017)

Dari program keaksaraan fungsional yang dijalankan tentunya diperlukan dana agar kegiatan

pengentasan buta aksara bisa berjalan dengan baik dan terfasilitasi. Dana yang digunakan untuk program pengentasan buta aksara ini berasal dari APBD dan APBN. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendapat bantuan dana dari pusat (APBN), ini salah satu faktor pendorong pengentasan buta aksara bisa cepet segera ditangani. Pernyataan ini di dukung oleh hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Murni, sebagai berikut :

“... dari sejak tahun 2011 sampek tahun 2015 dana untuk pemberantasan buta aksara kita dapat dari APBD dan APBN mbak. Tapi, tahun kemaren 2016 itu kita hanya dapat dari APBN saja, dan 2017 ini insyaAllah kita dapat dari APBN lagi, mudah-mudahan dapat mbak mudah-mudahan tapi masih belum ada kabar, biasanya sih dapat, seperti itu mbak. Besar dana yang diberikan itu berkelompok belajar mbak, satu kelompok mendapatkan dana 4.600.000 mbak. (Wawancara : 3 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dana yang diperoleh untuk pemberantasana buta aksara di dapat dari APBD dan APBN. Selanjutnya terkait dengan tutor keaksaraan fungsional, dalam pemilihan tutor keaksaraan fungsional tidak dilakukan dengan sistematis atau prosedural. Hal ini dikarenakan tutor keaksaraan fungsional itu berasal dari orang-orang yang memang sudah ikut dalam organisasi masyarakat seperti persit, al irsyad, Pkk dan lain sebagainya. Ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Murni selaku Kepala Bidang Pendidikan Nonformal :

“... Pemilihan tutor keaksaraan fungsional itu tidak ada kriteria khusus mbk. Dalam proses belajar mengajar kita dibantu oleh beberapa organisasi masyarakat, seperti PKK, Persit, Al Irsyad dan banyak lagi, ada sekitar 9 organisasi. Disini juga misalnya ada guru paud, guru sd, itu juga boleh kalau mereka memang bersedia dan mau untuk ikut membantu mengajar mbak. Kan kita tidak memaksa ya kalau memang ibu-ibu guru itu tadi mau ikut mengajar dan juga guru paud ini sebenarnya memang kita anjurkan untuk ikut mengajar, karena mereka kan sudah terbiasa mengajari anak kecil dan pastinya lebih telaten mbak buat mengajari orang tua.”
(Wawancara : 3 Maret 2017)

Pernyataan ini juga didukung oleh tutor keaksaraan fungsional dari Persit Ibu Zumariyah dan Al irsyad ibu Nur, sebagai berikut :

“..... eh pemilihan tutor ya mbk? kalau pemilihan tutor kemaren itu tidak ada yang sampek kayak gitu ya mbk. Karena kan tutornya ya kan kita sendiri gabungan

dari organisasi masyarakat disini yang memang sudah ada dan sudah aktif di organisasi itu mbak. “ (Wawancara : 10 Maret 2017)

“.... Kalau tutor itu gak dipilih ya mbak. Tutor itu memang dari kita yang ikut dalam organisasi ini kayak persit, alirsat, bayangkari, dan bisa juga ibu-ibu guru sd atau paud yang memang free dan mau ikut mengajar gt mbak. Kan yang terpenting mereka yang belajar disini itu memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang lebih mumpuni gt kalo saya bilang mbk dari pada mereka yang kita ajari, gitu sih mbak setau saya kemaren itu...” (Wawancara : 15 maret 2017)

Selain dari pemilihan tutor, yang tak kε penting juga mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bagi penyandang buta aksara. Sarana dan prasarana disini yang akan membantu penyandang buta aksara dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut pernyataan yang mendukung tentang sarana dan prasarana, yang disampaikan oleh Bapak Farid selaku Kepala Sesi Bidang Pendidikan Nonformal, sebagai berikut :

“... kalau sarana dan prasarana itu langsung kita serahkan pada penyelenggara mbak. Mengenai tempat atau alat yang dibutuhkan itu sudah di diskusikan oleh penyelenggara bersama dengan desa. Biasanya berpindah-pindah seperti di musholla, balai desa dan lain sebagainya. Nanti kita kan tinggal menyalurkan dana untuk penyandang buta aksara di setiap desa untuk pembelian alat tulis, papan, kertas, gaji tutor, seperti itu mbak. “ (Wawancara : 7 Maret 2016)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Nur selaku tutor keaksaraan fungsional :

“ Sarana dan prasarana itu disediakan sendiri oleh setiap desa mbak. Seperti misalnya gedung yang digunakan untuk tempat belajar mengajar. Biasanya kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di balai desa, mushollah, TPQ, rumah warga, pondok pesantren, itu semua tergantung dari pihak penyelenggara.. Nah, untuk meghindari ketidakhadiran warga belajar, setiap akhir pembelajaran kita sosialisasikan lagi mbak besok tempatnya dimana, besok materi apa, kadang kan kita nyuruh buat warga belajar membawa apa gitu untuk kegiatan belajarnya itu mbak. ...” (Wawancara : 15 maret 2016)

Kegiatan pembelajaran bagi penyandang buta aksara tidak semata mata langsung ada tanpa adanya sosialisasi kepada warga terlebih dahulu. Sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan tentunya harus ada sosialisasi mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dimana kegiatan akan dilakukan, jam berapa kegiatan akan dilakukan, tutor pengajarnya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti diungkapkan oleh Suhaeni penyandang buta aksara di Desa Cerme yang berusia 38 tahun, sebagai berikut :

“..... enggi dek, se pas bedede e panganjeren ngak genika bedede kabek kadek deri pak RT esoro kumpul neng e balai desa. Ye deteng kule. Ngedingngagi bedede napa. Ye gun eberik taoh jek bedede e pangajeren gebey orang-orang se tak taoh maca, tak taoh noles, ngak rua gun. Eberik tao kia kennengnganna edimma, kol berempa dekyeh.... “ (Wawancara : 19 Maret 2017)

“.... iyah dek, ketika ada berita kalo akan ada kegiatan pembelajaran itu, kita diberitahu oleh pak RT buat datang ke balai desa. Ya saya datang. Mendengarkan apa yang sedang dibahas. Ternyata ya tentang pembelajaran buat orang-orang yang masih belum bisa untuk membaca, belum bisa untuk menulis, gitu aja. Dikasih tahu juga tempatnya dimana sama jam berapa kegiatannya itu akan dilakukan...”(Wawancara : 19 Maret 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ifa penyandang buta aksara di Desa Jambesari yang masih berusia 23 tahun :

“.... Gih bedede penyuluhan can pak RT ning e balai desa. Deteng kule bik reng orang. Mangkana penyuluhan jek bedede e pengajeren gebey orang se tak taoh maca ben noles. Ye alhamdulillah kan ye mbak gik bedede se endek ngajerenna mak pendeh taoh ka tolesan. Eberrik taoh kia kol berempah, edimmah, ngak rua nyare bekto ye esesuai agi bik kosong a reng orang, kan desa ye mbak kan ampo gik ka sabeh, gik bedede se nguan sape, kan debideh seneka kaparloanna orang. Tape ye buk ibukna rua ye sabber beih nyare bekto se pas. Haha “ (Wawancara : 19 Maret 2017)

“.... Ya ada penyuluhan kata pak RT di balai desa. Saya datang bersama dengan orang-orang. Ternyata penyuluhan kalau aka nada pembelajaran buat orang yang tidak bisa baca dan tulis. Ya alhamdulillah kan ya mbak masih ada

yang mau mengajari kita, biar setidaknya kita mengerti baca tulis. Dikasih tauh juga jam berapa, dimana, kemaren itu juga nyari waktu yang tepat dan disesuaikan dengan keperluan orang-orang. Kan namanya orang desa ya mbak, kan kadang masih ada yang ke sawah, masih ada yang mengembala sapi, kan beda-beda gt mbak keperluannya orang-orang. Tapi ya ibu-ibunya itu sabar buat cari waktu yang kosong itu mbak. Haha (Wawancara : 19 Maret 2017)

Sosialisasi adalah salah satu bagian yang penting untuk keberhasilan sebuah program atau rencana kerja yang akan dilaksanakan. Apabila sebuah instansi dapat mensosialisasikan dengan baik kegiatan yang akan dilaksanakan, itu merupakan sebuah titik terang bahwa akan ada banyak pihak yang ikut membantu kelancaran kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di dapat dilihat bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara program pengentasan buta aksara bisa dibilang baik. Ini terbukti dengan antusias warga yang datang untuk mendengarkan apa yang sedang di sampaikan oleh pihak penyelenggara dan rasa syukur warga belajar dengan adanya kegiatan program pengentasan buta aksara tersebut.

Setelah sosialisasi dilakukan hal selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah penyediaan sumber daya. Penyediaan sumber daya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya materiil. Sumber daya manusia adalah ketersediaan tutor untuk mengajar dalam program pengentasan buta aksara. Sedangkan sumber daya materiil adalah ketersediaan dana untuk memfasilitasi berjalannya program pengentasan buta aksara. Kedua sumber daya ini harus terpenuhi dengan baik agar tercipta keselarasan dan kesinambungan dalam berjalannya program buta aksara, untuk meminimalisir terjadinya kendala yang berarti. Terkait dengan sumber daya, berikut adalah pernyataan dari Ibu Murni :

“... Sumber daya itu terkait dengan bagaimana instansi menyediakan tutor-tutor yang baik yang mampu mengajar dengan telaten, karena kan objeknya kebanyakan orang yang sudah tua yah sekitar 30 tahun keatas. Terus juga bagaimana kita menyediakan tim penyelenggara buta aksara, timnya kan di bagi dari tim kecamatan, tim desa dan tim tutor. Sedangkan kalau sumber daya materiil, seperti pemenuhan alat tulis (pensil, buku bacaan, buku tulis, papan, penghapus), transport tutor, dan lain sebagainya itu sudah kita usahakan. Kan seperti tadi yang saya katakan di awal kita mendapatkan bantuan dana dari APBD dan APBN, nah itu yang

digunakan untuk pemenuhan fasilitas dalam program ini, gitu mbak...” (Wawancara : 3 Maret 2017)

Hal serupa mengenai sumber daya, juga dijelaskan oleh ibu Zumariyah, sebagai berikut :

“... sumber daya ya mbak, kalau sejauh ini yang sudah berlangsung yang masih aman-aman saja, artinya semua masih terpenuhi. Tutor ya cukup mumpuni, cukup aktif, kan kita juga ada rapat evaluasi setiap bulan apa yang kurang dari tutor kita benahi lagi. Ada yang punya ide dalam pembelajaran bisa kita masukkan kalau diterima dalam rapat. Dan kalau masalah fasilitas ini saya kira juga sudah cukup baik. Pemenuhan alat tulis, uang transport dan gaji tutor ya lancar-lancar saja. Gak ada masalah sih mbak sejauh ini. Ya mungkin ada bleset dikit dari tanggal biasanya cair tanggal 1 keluar tanggal 3. Kalau Cuma seperti itu kan bisa ditangani...” (Wawancara : 10 Maret 2017)

Suhaeni selaku warga belajar juga mengatakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh penyelenggaraan program buta aksara sudah cukup baik. Ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan akan alat tulis, papan, dan tim tutor yang baik. Berikut adalah pernyataan suhaeni mengenai sumber daya yang ada :

“...ye mon can abek kule ye la begus dek, kule kan gun deteng, ajer maca, ajer noles. Tape jed la begus onggu dek, jek la buku bede, pensil bede, papan ye bede, ye la gun kare tojuk eajerin marelah. Mon ibu-ibu se ngajer ye nyaman kia, sabber ngajerinna, kan tak duli bisa macana ria apa, eajeri e lang ulang...” (Wawancara : 19 Maret 2017)

“.. ya kalau kata saya ya sudah bagus dek, saya kan cuma datang, belajar membaca, belajar menulis. Tapi ya memang sudah bagus beneran, buktinya apa-apa sudah tersedia, cuma tinggal duduk, diajari ya sudah. Kalau ibu-ibu yang mengajari (tutor) ya enak juga, sabar ngarainnya, kan saya gak cepet bisa memahami dan menganal ini huruf apa, ini cara bacanya gimana, ya diajari di ulang-ulang terus gitu...” (Wawancara : 19 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan sumber daya baik sumber daya manusia atau sumber daya materiil, sudah terpenuhi dengan baik. Ini terbukti dengan jawaban Suhaeni sebagai warga belajar yang merasa puas dengan fasilitas yang diberikan. Tutor juga merasakan hal yang sama, bahwa anggaran dana yang disediakan oleh Dinas Pendidikan sudah cukup memadai. Selanjutnya adalah mengenai sikap pelaksana. Sikap pelaksana disini

mencakup bagaimana tingkat kedisiplinan tim penyelenggara dan tutor dalam mengajar dan pemantauan/*monitoring* yang dilakukan oleh tim penyelenggara selama program pengentasan buta aksara berlangsung. Terkait sikap pelaksana ini disampaikan oleh Pak Farid, sebagai berikut :

“...pemantauan atau *monitoring* ini dilakukan secara bergantian disetiap daerah mbak. Seperti minggu pertama di daerah Binakal, minggu kedua ke sekar putih, minggu ketiga ke wringin anom begitu seterusnya. Pemantauan ini dilakukan oleh orang tim penyelenggara paling atas bisa dari Dinas Pendidikan atau tim kecamatan. Seperti kemaren Bupati melakukan pemantauan ke salah satu tempat belajar, nah disitu Bupati melihat sendiri bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Apa saja fasilitas yang ada, antusias warga belajar juga bagaimana. Jadi kalau masalah pemantauan/*monitoring* itu selalu dilakukan secara bergantian, dan nanti ada laporan yang masuk ke Dinas Pendidikan begitu...” (Wawancara : 7 Maret 2017)

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ifa sebagai warga belajar, mengenai sikap pelaksana. Sikap pelaksana yang berkaitan dengan kedisiplinan tutor yang mengajar.

“... *engak apa gih mbak, tak pate paham kule. Ye paleng tak taoh deteng dibudhi jek se ngajer. Meste la bedhe se ajege. Die se edentek mbak. Kan ye pajed bok ebok kan bennyak lakonah kadeng. Mon sengajer ma meste deteng kadek mbak. Tape ye ampo bede se telat. Settong due tak kakabbi. ...*” (Wawancara : 19 Maret 2017)

“ .. kayak apa mbak, gak paham saya maksudnygimana. Ya gak pernah datang belakang kalau buat yang ngajar-ngajar. Mesti sudah ada yang jaga-jaga. Malahan kita yang di tunggu mbak. Kan ya tauh sendiri kalau ibi-ibu kan biasanya banyak kerjaan ya mbak. Kalau yang mengajar mah biasanya datang duluan. Tapi ya kadang ada yang telat juga satu dua gitu gak semua...” (Wawancara : 19 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sikap pelaksana di bidang kedisiplinan dan pemantauan, dirasa sudah cukup baik. Pemantauan/*monitoring* dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan atau tim penyelenggara kecamatan, bahkan Bupati Amin sempat terjun langsung melakukan pemantauan ke tempat

penyelenggaraan program pengentasan buta aksara di salah satu desa di Bondowoso. Sedangkan masalah kedisiplinan ini seperti di sampaikan warga belajar Ifa, yang mengatakan bahwa tutor keaksaraan fungsional biasanya selalu datang lebih awal. Meskipun terkadang masih ada tutor yang datang terlambat tapi hanya mungkin sekitar satu atau dua orang saja.

Yang selanjutnya, terkait dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi disini menganai tentang bagaimana tim penyelenggaraan pada tingkat kecamatan dan desa melaksanakan prosedur penyelenggaraan pengentasan buta aksara (pendataan warga belajar, pendataan tutor, pembentukan kelompok belajar, proses belajar mengajar). Bisa juga mengenai tingkat koordinasi antara tim kecamatan, tim desa dan tutor dalam program pemberantasan buta aksara. Pernyataan mengenai struktur organisasi akan disampaikan oleh Pak Farid, sebagai berikut :

681 “... mengenai prosedur penyelenggaraan pengentasan buta aksara saya berjalan dengan baik mbak. Pendataan warga belajar itu selalu ada laporan tahunan, seperti skema ini mbak, nah kan bisa dilihat kalau ada jumlah penurunan buta aksara setiap tahunnya. Pendataan tutor itu memang sudah dilakukan sejak awal ya mbak, kalau masalah pembentukan kelompok belajar sama proses belajar mengajar saya serahkan semua pada tim penyelenggara. Nanti tim penyelenggara bersama dengan tutor akan membagi setiap kelompok belajar mbak. ... (Wawancara : 7 Maret 2017)

Pada kegiatan program keaksaraan fungsional setiap warga belajar akan dibentuk kelompok belajar oleh para tutor. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok berjumlah sekitar 10 orang dengan anggota laki-laki dan perempuan. Mengenai struktur birokrasi juga dijelaskan oleh tutor keaksaraan fungsional ibu Nur :

“... kalau pendataan warga belajar itu biasanya dilakukan oleh penyelenggara tim kecamatan mbak. Kalau tutor kan hanya mengajar. Kalau seperti itu kan biasanya ada yang bagian pemantauan nah itu sekaligus mendata. Ya kita yang kasih datanya sesuai dengan apa yang ditanya, jumlahnya berapa seperti itu. Kalau masalah proses belajar mengajar itu diserahkan kepada tutor, hari ini kita akan belajar apa, membaca apa, menghitung apa, itu sudah ada semua. Nah kan sebelumnya saya bilang kalau program pengentasan buta aksara ini ada dua program ya. Yang pertama keaksaraan

dasar dan yang kedua keaksaraan lanjutan. Keaksaraan dasar disini mbak, kita ajarkan mereka membaca dan menulis, dari yang gampang dulu lah yang berakaitan dengan yang ada disekitar kita, kayak meja, kursi, nama orang seperti itu. “ (Wawancara : 15 Maret 2016).

Metode yang digunakan oleh tutor dalam pembelajaran di kegiatan keaksaraan fungsional dasar itu berbeda-beda. Jadi setiap tutor memiliki beberapa metode yang berbeda dalam pembelajaran, beberapa diantaranya adalah metode SAS, metode poster abjad, metode suku kata dan metode kata kunci. Dari beberapa metode itu dipilih metode mana yang sesuai dengan tema pelajaran saat itu dan dianggap paling efektif untuk diterima oleh warga belajar. Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa struktur birokrasi dari pusat yaitu dinas pendidikan dan tim penyelenggara dari tingkat kecamatan. Desa hingga tutor melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Disini juga dijelaskan bahwa ketika warga belajar dinyatakan lulus keaksaraan dasar maka mereka melanjutkan ke keaksaraan fungsional lanjutan atau sering disebut dengan keaksaraan usaha mandiri. Pada keaksaraan lanjutan ini warga belajar diajarkan untuk memiliki keterampilan sehingga mereka dapat menghasilkan *income* dan mengentaskan kemiskinannya.

Pembahasan

Pada kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi program pengentasan buta aksara memperoleh hasil bahwa program yang digunakan dapat menurunkan angka buta aksara di Kabupaten Bondowoso. Penurunan angka buta aksara ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tutor yang baik, sarana dan prasarana yang mencukupi, struktur birokrasi yang amanah dan penyaluran dana yang tepat.

Dalam strategi dan kebijakan SKPD Bidang Pendidikan Kabupaten Bondowoso ada 6 strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Dari enam strategi yang ada, strategi yang menangani masalah buta aksara adalah strategi ke lima. Strategi T5 ini berisi tentang (a) penyediaan dan peningkatan kualitas kualifikasi dan kompetensi tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup yang memadai, (b) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, (c) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, strategi-strategi yang ada di tujuan T5 menangani tentang ketersediaan dan

keterjangkauan layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan orang dewasa ini ditujukan kepada orang-orang penyandang buta aksara yang ada di Kabupaten Bondowoso. Penyandang buta aksara yang dimaksud disini adalah warga Bondowoso yang tidak memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung dari usia 15 tahun hingga 59 tahun.

Bentuk program yang digunakan dalam pengentasan buta aksara di kabupaten Bondowoso. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dalam penanganan pengentasan buta aksara di Bondowoso menggunakan program keaksaraan fungsional. Program keaksaraan fungsional yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan ini diantaranya adalah kegiatan keaksaraan fungsional dasar dan kegiatan keaksaraan fungsional lanjutan.

Kegiatan keaksaraan fungsional dasar adalah langkah awal dalam menangani pengentasan buta aksara di kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan keaksaraan fungsional dasar, warga belajar diajarkan untuk membaca, menulis dan berhitung. Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada kegiatan calistung setiap tutor memiliki metode yang berbeda satu sama lainnya. Metode yang digunakan adalah metode yang dianggap paling mudah diterima oleh para warga belajar. Pada kegiatan keaksaraan fungsional dasar ini berlangsung sekitar 6 bulan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelatihan membaca, menulis dan berhitung, pemberian soal-soal, dan adanya ulangan atau tes. Ini ditunjukkan dengan hasil observasi saat dilapangan, penulis mengambil gambar tentang bentuk soal serta bentuk ulangan yang diberikan, ada pada lampiran.

Pada proses belajar mengajar tutor menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran, diantaranya adalah : (1) Metode *structure – analytic – synthesis* (SAS). Metode SAS menekankan bahwa belajar membaca dan menulis dapat bermanfaat serta menarik minat warga belajar apabila menggunakan berbagai informasi yang dekat dengan diri mereka. Ketertarikan itu, akan bertambah lagi jika apa yang dipelajarinya memang diperlukan oleh warga belajar dan fungsional bagi kehidupannya. (2) Metode suku kata sangat efektif untuk membantu warga belajar buta aksara murni. Konsep utama dalam metode ini adalah mempelajari suku kata yang berasal dari kata-kata tertentu yang sering dilafalkan dan memiliki makna yang jelas, dengan prinsip mengulangi, menghafal dan melatih tentang semua huruf baik konsonan maupun vokal yang membentuk suku kata tersebut. (3) Metode ini awalnya dikembangkan oleh Paulo Freire yang berbasis pada proses penyadaran warga belajar tentang dunia kehidupannya. Salah satu teknik

yang digunakan ialah penyajian gambar-gambar yang melukiskan situasi kehidupan nyata dalam bentuk simbol atau gambar. Seraya mengamati gambar-gambar atau poster tersebut, warga belajar dirangsang untuk mengenali kenyataan kehidupan mereka dan selanjutnya ditantang untuk merefleksikan dan memikirkan kenyataan tersebut. Dalam pembelajarannya, digunakan juga tema-tema penggerak (*generative themes*) dan kata-kata kunci (*key words*) yang diangkat dari kehidupan masyarakat dan mengandung makna langsung bagi kehidupan warga belajar. (4) Metode poster abjad sangat efektif untuk membantu warga belajar buta aksara murni. Konsep utama dalam metode ini tidak sekedar mempelajari abjad dari A – Z seperti anak SD belajar abjad, tetapi dengan menggunakan benda-benda nyata yang ditempelkan sesuai huruf pertama nama benda tersebut.

Kegiatan yang kedua adalah kegiatan keaksaraan fungsional lanjutan. Kegiatan keaksaraan fungsional lanjutan lebih dikenal dengan kegiatan keaksaraan fungsional usaha mandiri. Kegiatan ini berisi tentang bagaimana warga belajar diajarkan untuk bisa memiliki keterampilan. Contohnya, warga belajar diajarkan untuk membuat bernyet (tempat ikan), membuat kue, membuat kerajinan tempat tape dan lain sebagainya. Ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi pada lampiran saat warga belajar sedang melakukan kegiatan belajar membuat kue kering. Kegiatan keaksaraan usaha mandiri ini berlangsung selama kurang lebih 3-5 bulan. Setelah lulus warga belajar mendapat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Program, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso. Program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso sudah berjalan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Programnya dikenal dengan nama keaksaraan fungsional, keaksaraan fungsional disini dibagi menjadi dua kegiatan yakni keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan.

Pelaksanaan program keaksaraan fungsional ini, dimulai pada keaksaraan fungsional dasar yang dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini pembelajaran dilaksanakan 2 sampai 3 kali dalam seminggu sesuai dengan kesepakatan tutor dengan warga belajar. Ini terjadi karena tutor harus menyesuaikan dengan kegiatan setiap warga belajar, setiap warga memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga harus dicari waktu yang memang benar-benar kosong untuk kegiatan pembelajaran.

Pada kegiatan keaksaraan fungsional dasar ini warga belajar diajarkan untuk membaca, menulis dan berhitung. Kegiatan calistung yang diberikan disesuaikan dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh mayoritas warga belajar, sehingga warga belajar tidak merasa begitu kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. Metode yang digunakan juga dipilih oleh tutor karena tutor lebih mengetahui metode mana yang dirasa paling efektif dan mudah dipahami oleh warga belajar. Pada kegiatan keaksaraan fungsional dasar ini warga belajar akan diberi soal-soal untuk mengingat lagi pembelajaran yang sudah diterima. Pada akhir kegiatan setelah berlangsung selama 6 bulan akan ada ulangan atau tes akhir untuk menyatakan bahwa warga belajar dinyatakan lulus keaksaraan fungsional dasar. Ketika warga belajar sudah dinyatakan lulus maka warga belajar akan mendapatkan ijazah berupa SUKMA 1.

Sedangkan pada kegiatan keaksaraan fungsional lanjutan atau sering disebut dengan keaksaraan fungsional usaha mandiri, warga belajar diajarkan untuk memiliki keterampilan. Keterampilan disini berupa menjahit, membuat kerajinan seperti bernyet, tempat sebagainya. Ini dibuktikan dengan hasil dokumentasi pada lampiran yang menunjukkan kegiatan warga belajar sedang membuat kue kering.

Kegiatan keaksaraan fungsional usaha mandiri ini dilakukan selama kurang lebih 3-5 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah warga secara sukarela atau bisa juga di balai desa sesuai dengan kesepakatan. Warga belajar yang sudah dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah yakni SUKMA 2 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Evaluasi dari program keaksaraan fungsional dapat dilihat ketika para tutor memberikan soal-soal untuk dikerjakan warga belajar. Evaluasi tingkat awal ini dapat dijadikan acuan bagaimana perkembangan warga belajar setelah mendapat pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Dari soal-soal yang diberikan akan terlihat pada tahap mana yang kurang dipahami oleh warga belajar. Misalnya pada tahap berhitung warga belajar masih banyak yang kurang paham, maka pada kegiatan selanjutnya akan lebih diperdalam pada kegiatan berhitung. contoh soal yang diberikan pada saat pembelajaran sudah dilampirkan pada bagian lampiran.

Evaluasi juga dilakukan pada kegiatan keaksaraan usaha mandiri. Disini warga belajar dilihat apakah warga belajar mampu untuk membuat kue atau kerajinan sesuai dengan intruksi yang diberikan. Misalnya pada kegiatan membuat kue apakah kue yang dihasilkan terlihat baik dari segi tekstur, rasa, dan warnanya sehingga akan

membuat konsumen tertarik untuk membeli. Tutor akan terjun langsung untuk membantu warga belajar mendapat hasil yang maksimal saat proses kegiatan mengasah keterampilan itu dilakukan. Dengan ini proses evaluasi dirasa sangat efektif karena juga dilakukan pemantauan di dalamnya tentang bagaimana kegiatan itu dilakukan.

Pengimplementasian program pengentasan buta aksara menurut teori Edward III adalah program pengentasan buta aksara dianalisis berdasarkan teori Kebijakan Publik menurut Edward III adalah sebagai berikut : yang pertama komunikasi, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Pada kegiatan program keaksaraan fungsional komunikasi sudah terjalin dengan baik. Ini ditunjukkan dengan adanya sosialisasi mengenai program pengentasan buta aksara yang dilakukan oleh tim penyelenggara kepada warga yang mengalami buta aksara di setiap desa. Proses sosialisasi dirasa perlu dilakukan jika sebuah instansi atau organisasi akan mengadakan program kerja. Ini dimaksudkan agar objek (warga belajar) dapat mengerti kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan apa tujuannya. Warga belajar juga merasa puas dengan adanya sosialisasi sebelum dilaksanakannya program pengentasan buta aksara, seperti yang disampaikan oleh Suhaeni dan Ifa pada : observasi dan dilakukannya wawancara sebagai wa _ belajar di salah satu desa.

Komunikasi yang baik juga ditunjukkan oleh tim penyelenggara dan tutor. Dimana ada koordinasi antara keduanya sehingga penyampaian tempat dan keperluan yang perlu dibawa oleh warga belajar tersampaikan. Proses belajar mengajar juga berjalan dengan baik. Ini terlihat dari antusias warga belajar yang datang. Ini diperkuat dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa banyak warga belajar yang datang, ditunjukkan dengan hasil foto pada lampiran. Warga belajar merasa terbantu dengan adanya program keaksaraan fungsional dengan tenaga pengajar (tutor) yang kompeten dan telaten dalam mengajar.

Yang selanjutnya adalah faktor sumber daya. Faktor sumber daya ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya materiil. Sumber daya manusia disini dapat kita lihat dari penyediaan dan peningkatan kualitas tutor keaksaraan fungsional. Tutor keaksaraan fungsional sudah diberi penyuluhan dan melakukan rapat sebelum terjun ke lapangan. Mereka mendapatkan bekal berupa metode, teknik, dan cara penyampaian yang baik, agar warga belajar dapat dengan mudah menerima materi yang diajarkan. Tutor juga berasal dari guru paud dan guru SD yang sudah berpengalaman dalam mengajar, sehingga kemampuan yang sudah dimiliki tidak perlu diragukan lagi.

Sumber daya materiil adalah sumber daya yang berupa dana. Program pengentasan buta aksara ini sudah mendapatkan bantuan dana dari APBN dan APBD. Jadi penyediaan subsidi pembiayaan untuk pencapaian sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas sudah terjamin. Setiap tahunnya dana turun dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan langsung masuk ke dalam rekening tim penyelenggara kegiatan yang sudah bertanggung jawab dalam pengaturan dana. Dana yang diberikan oleh pemerintah itu digunakan untuk sarana dan prasarana yang diperlukan selama program pengentasan buta aksara. Ini dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan pengalokasian dana yang telah diterima, alokasi dana tersebut ada pada lampiran. Besarnya dana yang diberikan pemerintah adalah sekitar 4.600.000 per kelompok belajar. Pada setiap kelompok belajar beranggotakan sekitar 10 orang dengan 1 tutor.

Setelah itu adalah faktor sikap pelaksana. sikap pelaksana yang dimaksud disini adalah sejauh mana tingkat keinginan, kemauan, kedisiplinan dan kemampuan para pelaku kebijakan dalam menjalankan program pengentasan buta aksara. Sikap pelaksana dapat kita lihat dari kegiatan *monitoring* atau pemantauan. Ini dibuktikan dengan hasil foto pada lampiran, yang unjukan kegiatan monitoring saat Bupati Bondowoso ng untuk memantau berjalannya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pemantauan biasa dilakukan oleh tingkat yang paling atas, atau kalau disini biasanya dilakukan oleh tim penyelenggara kecamatan. Warga belajar akan merasa mendapat perhatian dan biasanya menjadi lebih semangat apabila diperhatikan, sehingga disini tutor juga ikut andil dalam kegiatan pemantauan karena tutor adalah orang yang lebih dekat dengan warga belajar. Sesekali juga kegiatan program pengentasan buta aksara ini di datangi langsung oleh Bupati Bondowoso Bapak Amin untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada dan melihat apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah terpenuhi.

Sikap pelaksana akan mempengaruhi proses berjalannya suatu kebijakan. Bila pelaksana tidak dapat memantau sejauh mana program itu berjalan, dan apakah program itu berjalan dengan baik atau tidak, maka tidak akan ada peningkatan kualitas untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Suatu program akan bisa dikatakan berhasil apabila sikap pelaksana itu terbuka dan mau untuk mendapatkan kritikan dari warga yang menjadi objek sasaran suatu program.

Yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah pembagian wewenang atau bisa juga hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Pembagian wewenang disini diperlukan adanya kerjasama yang baik mulai dari tingkat atas (kabupaten) sampai pada tingkat bawah

(desa) dan tutor. Struktur birokrasi disini dapat kita lihat tugasnya berdasarkan dengan prosedur penyelenggaraan kegiatan dalam program buta aksara. Prosedur penyelenggaraan disini dapat berupa pendataan warga belajar, pendataan jumlah tutor, kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Ini menyangkut dengan tugas per unit dalam suatu organisasi.

Tingkat koordinasi tim kecamatan dan tim desa juga termasuk dalam struktur organisasi. Koordinasi dari tim desa dan kecamatan dibuktikan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa setiap tim menjalankan tugasnya masing-masing. Contohnya ketika tim *monitoring* harus memonitoring desa cermee maka tim tersebut akan berangkat ke desa cermee untuk melakukan pemantauan, jika tutor haru mengajar membaca hari ini sesuai agenda, maka pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran membaca, dan lain sebagainya. Setiap kegiatan belajar mengajar merupakan tanggung jawab tutor kepada warga belajar. Kegiatan pembelajaran yang diberikan tutor kepada warga belajar akan disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh tutor. Struktur birokrasi berjalan pada kegiatan ini. Dimana tutor menjalankan tugasnya untuk mengajarkan kepada warga belajar bagaimana caranya membaca, menulis dan berhitung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program pengentasan buta aksara di Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Program yang digunakan berupa keaksaraan fungsional dengan dua kegiatan yakni keaksaraan fungsional dasar dan keaksaraan fungsional lanjutan atau usaha mandiri. Pelaksanannya dilaksanakan secara bergantian. Pada keaksaraan fungsional dasar dilaksanakan selama 6 bulan dengan kegiatan pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan, pada keaksaraan fungsional usaha mandiri dilaksanakan kurang lebih 3-5 bulan. Ketika warga belajar sudah dinyatakan lulus maka warga belajar akan mendapatkan ijazah berupa SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

Evaluasi program keaksaraan fungsional dilakukan dengan pemberian soal-soal dan ulangan pada kegiatan keaksaraan fungsional dasar. Pada keaksaraan fungsional lanjutan dengan pedampingan saat diberikannya keterampilan sehingga selain evaluasi juga terjadi proses monitoring oleh penyelenggara kegiatan dan tutor.

Saran

Guna suksesnya program pengentasan buta aksara di tahun-tahun berikutnya, saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut : (1) Selesai program pengentasan buta aksara, agar dilanjutkan ke program pembinaan dan pelestarian, agar warga belajar yang sudah melek aksara supaya tidak menjadi buta aksara kembali, (2) Kegiatan membaca, menulis dan berhitung supaya tetap diutamakan dan dilaksanakan sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan warga belajar, dan (3) Para pelaksana program pengentasan buta aksara diharapkan tetap melakukan koordinasi yang baik, dari tingkat atas hingga bawah, agar program pengentasan buta aksara dapat terselesaikan di akhir tahun 2017 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka
- Hiryanto. 2009. Efektivitas program pemberantasan buta aksara melalui kuliah kerja nyata (KKN) tematik di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Yogyakarta. Vol.02, No1
- Kamil, Mustofa. 2009. *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKMB) Di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Kominkan Di Jepang)*. Bandung: Alfabeta
- 685 us Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnadi, dkk. 2005. *Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Marzuki, Saleh. 2012. Pendidikan nonformal dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan adragogi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soetomo. 2007. *Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Penada.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (online), (sindikker.dikti.go.id), (Diakses tanggal 12 Desember 2016)

Yamin, Martinis. 2013. *Strategi dan Metode dalam Pembelajaran*. Jakarta: GP PREES GROUP.